



tribunjogja.com HARIAN PAGI **Tribun Jogja** A PART OF TRIBUNNEWS.COM  
KAMIS WAGE  
2 APRIL 2026  
13 SYAWAL 1447  
NO 5303/TAHUN 15  
TERBIT 22 HALAMAN

Rp3.000 • LANGGANAN Rp83.000 • INFO IHLAN - LANGGANAN: 0851.021.22000 • 0274-566791

# ASN SLEMAN TIDAK WFH

## ■ Tetap Kerja di Kantor Agar Pelayanan Tetap Optimal

### Rentan Dimanfaatkan untuk Liburan

**PENGAMAT** Kebijakan Publik, Tribus Rahardiansah mengatakan, kebijakan menerapkan WFH rentan dimanfaatkan oleh ASN untuk kebebasan berlibur. Hal ini karena hari yang ditetapkan oleh pemerintah berurutan dengan hari libur ASN di tiap pekannya.

"Ini sangat tergantung dari kepala unit, kepala unit masing-masing ini kan masing-masing Kementerian lembaga kalau di pusat mungkin masih bisa dipantau. Nah tapi kalau di daerah ini bisa long weekend itu," kata Tribus, Rabu (1/4).

Tribus mempertanyakan alasan pemerintah memilih hari untuk menerapkan WFH bagi ASN. Menurut dia, jika memang tujuannya untuk membuat penggunaan BBM, pemerintah bisa menerapkan WFH setiap Rabu yang merupakan pertengahan hari di setiap pekannya.

**Banyak hal yang artinya jadi pertimbangan kami, untuk kami melayani seperti biasa.**

**SLEMAN, TRIBUN** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman akan tetap memberlakukan sistem kerja dari kantor atau work from office (WFO) setiap Jumat. Keputusan ini diambil demi menjaga optimalnya pelayanan masyarakat.

Bupati Sleman, Hendaru Kuswanto menjelaskan, pihaknya menghormati instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal penerapan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Namun, kondisi situasional di wilayah Kabupaten Sleman menuntut kehadiran fisik para ASN.

• halaman 11

### RAWAN TERJADI KECEMBURUAN

• Pemkab Sleman akan tetap memberlakukan sistem kerja dari kantor atau work from office (WFO) setiap Jumat. • Keputusan untuk tidak work from home (WFH) dilakukan demi menjaga optimalnya pelayanan masyarakat. • Menurut Bupati Sleman, kondisi situasional di wilayah Kabupaten Sleman menuntut kehadiran fisik para ASN. • Jika WFH diterapkan, justru dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan dan ribut karena tidak dilakukan merata. • Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sleman sejauh ini tidak keberatan untuk tetap masuk seperti biasa.

tribunjogja.com

**ASN Sleman**

• **Sambutan Harti**

Menurut Harda jika di berlakukan WFH justru dikawatirkan pelayanan menjadi tidak optimal. Sebab, baginya hampir seluruh sektor pelayanan di lingkungan Pemkab Sleman bereslah langsung dengan kebutuhan publik.

"Sehingga saya tetap meyakini masyarakat seperti biasa. Mungkin kami masih mungkin ya, tapi berkaitan dengan itu, situasional. Kalau di Sleman WFH itu pelayanan nggak bisa optimal, saya pikir tetap optimal. Kalau di Sleman kepada masyarakat," kata Harda, Rabu (1/4).

"Nanti kalau ada masyarakat yang betul-betul (Ruh) segera mendapatkan pelayanan, nanti akan ribet, nggak. Banyak hal yang artinya jadi pertimbangan kami untuk kami meluruskan seperti biasa," imbuh Harda. Harda mengatakan, para ASN di Sleman sejauh ini tidak keberatan untuk tetap masuk seperti biasa. Ia menilai, instruksi WFH mungkin memang diperlukan kondisi ritil pelayanan di tingkat wilayah.

Di sisi lain, Harda mengatakan ASN sudah dilakukan dan layanan yang bisa WFH mungkin memang diperlukan. Harda mengatakan, dia khawatir menimbulkan kecemasan dan ribet karena tidak merata.

Maka dengan sejumlah pertimbangan, di Sleman tetap diberlakukan WFH. "Karena mungkin saya, tidak semua pada saat perintah ini diturunkan, kita mungkin secara umum saja dilhat pelayanan, tapi di wilayah nggak dipertimbangkan, kata dia.

Nondist ini berbeda jika kondisi akan pada lima hari, sementara sepeka momentum di saat pelayanan. Ia mempunyai pemahaman bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas dan ASN di Kabupaten Sleman tidak keberatan jika tetap bekerja di kantor dengan baik.

Terkait efisiensi energi dan BBM yang menjadi latar belakang kebijakan WFH, Harda tidak akan melakukan pemotongan anggaran secara serampangan. Ia lebih memilih melakukan identifikasi detail atau istilahnya 'metode' terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan perangkat daerah.

"Kalau ada kegiatan kegiatan yang memang bisa ditunda atau ditiadakan, yang harus dilakukan. Sebagai betul-betul BBM itu sebagai napsunya kegiatan bisa dilakukan dengan baik," katanya.

"Kita harus hati-hati karena program yang disusun itu untuk pengurangan kemungkinan, menuju kesehatan. Sehingga kami tidak serampangan langsung potong. Akan saya pertimbangkan, saya identifikasi," imbuhnya.

Mengingat anjuran penggunaan transportasi umum atau sepeda bagi ASN untuk menghemat energi, Harda menilai belum menjadi solusi efektif saat ini. Hal ini karena keterbatasan jangkauan transportasi umum dan jarak tempuh tempat

tinggal pegawai yang cukup bervariasi.

Artinya, ada wilayah tertentu yang tidak mungkin diliputi dengan sepeda setiap hari. "Kalau sepeda ya stng seaneh (yang suka) saja, nggak enak (Batas ramahnya) Kangkringan rene nggak beresnya ya kendal itu naik sepeda setiap hari ya capek," katanya.

Berbeda dengan Sleman, Kota Yogyakarta akan melakukan kombinasi WFH satu hari dalam sepekan dan pembatasan BBM. Hal ini dilakukan dalam usaha menampung efisiensi energi di tingkat pemerintah daerah.

"Sudah saya putuskan, mengkonfirmasi dari Mendagri, kita WFH hari Jumat. Tapi malam SE sudah keluar dan siang ini tadi langsung kita rapatkan," kata Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, Rabu (1/4).

Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh ASN. Menurutnya, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi secara luring.

Perubahan struktural pun tidak mendapat jatah WFH demi memastikan roda pemerintahan dan koordinasi tetap berjalan optimal. "Sektor pelayanan bagian 2, dan bagian 3 itu juga tidak WFH, ya mereka tetap masuk seperti biasa. Harusnya tidak di bawahnya yang boleh WFH," katanya.

Fenak Yogyakarta juga menyuntikkan kebijakan kuota BBM harian bagi kendaraan pelat merah. Kebijakan yang disebut Hasto dengan istilah "plafonasi" tersebut, menjadi jawa tambahan untuk merencanakan APBD di sektor energi.

"Nah, plafonasi ini termasuk khusus dari Kota Yogyakarta," katanya. "Kita bisa betul-betul lima liter per satu liter per hari. Untuk empat hari berarti," ujarnya.

Ketika penggunaan bahan bakar tetap melebihi jatah yang telah dipatok, maka ASN yang bersangkutan harus merogoh kocek pribadi untuk menutup selisihnya.

Di Kulon Progo, Penda setempat memastikan kinerja ASN tetap terpantau meski di WFH. "Sebab sudah ada aplikasi dalam monitoring yang memotivasi ASN dan dilaporkan secara real-time," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo, Sudarmanto, Rabu (1/4).

Menurut Sudarmanto, saat aplikasi ini bisa diketahui pada keberadaan pegawai saat WFH. Selain itu, laporan dari pegawai juga harus mendapatkan persetujuan dari atasan, dalam hal ini Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Namun ia mengatakan, diperlukan penyesuaian, menyipatkan kebijakan WFH. "Terdapat dalam memastikan pegawai tetap bekerja saat WFH. Terutama ada penyesuaian kontrol, agar kinerja ASN tetap optimal dan terpanas meski WFH," ujar Sudarmanto.

Ia pun menyikapi pelaksanaan WFH sekali seminggu di Kulon Progo tidak akan

ini diprediksi mulai diterapkannya untuk hal lain. Apalagi penerapannya sudah pernah dilakukan, salah satunya saat sebelum dan sesudah libur Lebaran.

Suatu itu, ASN Kulon Progo melakukan work from office (WFH) pada dua hari sebelum libur Lebaran dan hari setelahnya. Namun, WFH diadani maksimal hanya 20 persen dari total ASN dalam satu OPD. "WFA kembali bisa jadi tahun evaluasi," kata Sudarmanto.

Wakil Bupati Kulon Progo, Antur Purwokito menyanggah kinerja ASN saat WFH harus menjadi perhatian. Ia tak ingin kinerja mereka jadi turun hanya karena mereka bisa bekerja dari rumah.

Ia menilai perlu ada indikator khusus dalam menilai kinerja ASN saat WFH. Tujuannya agar kebijakan WFH untuk penghematan energi tidak mengabaikan esensi kerja yang utama bagi para ASN.

"Terlalu ada pengawasan dan penilaian demi menjaga integritas kinerja ASN," jelas Antur.

Rupali Bantui, Abdul Halim Muallih mengatakan bahwa WFH akan terseleksi mana saja pekerjaan yang bisa dijalankan atau dikerjakan di rumah. Kemudian akan ditentukan mana saja yang harus diprioritaskan.

Yang terpenting di layanan publik, ya memang mungkin di rumah. Maka, kita belum mengingit berapa ASN yang bekerja dari rumah itu," ujarnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Bantul, Agie Budi Raharjo berujar, "sema kerja dalam waktu dekat ini ada WFH dan WFH. Yang dibicarakan WFH itu pejabat tingkat pratama, eselon III, eselon II, dan eselon I. Kita harus memastikan, terutama, pendapatan, layanan publik itu juga dibicarakan," paparnya.

Fenak Bantul juga akan memastikan bagaimana cara untuk bisa memantau para ASN agar benar-benar bekerja sesuai aturan WFH. Apalagi, beberapa waktu lalu, Pemkab Bantul sempat menerapkan work from office (WFO).

Tidak hanya Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipti Indragunil menginformasikan bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono V tidak memperlakukan terkait Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat perihal WFH. Namun, fleksibilitas kerja tidak boleh mengorbankan dengan baik.

Penda DIY menegaskan tidak akan menerapkan pemotongan WFH yang laku untuk semua instansi. Penentuan jumlah pegawai yang bekerja dari rumah akan bergantung pada jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing OPD.

Sektor yang istilahnya yang pelayanan langsung publik ya tidak bisa (WFH)," katanya.

Jika proses perumusan berjalan lancar, kebijakan ini diprediksi mulai diterapkannya untuk hal lain. Apalagi penerapannya sudah pernah dilakukan, salah satunya saat sebelum dan sesudah libur Lebaran.

Suatu itu, ASN Kulon Progo melakukan work from office (WFH) pada dua hari sebelum libur Lebaran dan hari setelahnya. Namun, WFH diadani maksimal hanya 20 persen dari total ASN dalam satu OPD. "WFA kembali bisa jadi tahun evaluasi," kata Sudarmanto.

Wakil Bupati Kulon Progo, Antur Purwokito menyanggah kinerja ASN saat WFH harus menjadi perhatian. Ia tak ingin kinerja mereka jadi turun hanya karena mereka bisa bekerja dari rumah.

Ia menilai perlu ada indikator khusus dalam menilai kinerja ASN saat WFH. Tujuannya agar kebijakan WFH untuk penghematan energi tidak mengabaikan esensi kerja yang utama bagi para ASN.

"Terlalu ada pengawasan dan penilaian demi menjaga integritas kinerja ASN," jelas Antur.

Rupali Bantui, Abdul Halim Muallih mengatakan bahwa WFH akan terseleksi mana saja pekerjaan yang bisa dijalankan atau dikerjakan di rumah. Kemudian akan ditentukan mana saja yang harus diprioritaskan.

Yang terpenting di layanan publik, ya memang mungkin di rumah. Maka, kita belum mengingit berapa ASN yang bekerja dari rumah itu," ujarnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Bantul, Agie Budi Raharjo berujar, "sema kerja dalam waktu dekat ini ada WFH dan WFH. Yang dibicarakan WFH itu pejabat tingkat pratama, eselon III, eselon II, dan eselon I. Kita harus memastikan, terutama, pendapatan, layanan publik itu juga dibicarakan," paparnya.

Fenak Bantul juga akan memastikan bagaimana cara untuk bisa memantau para ASN agar benar-benar bekerja sesuai aturan WFH. Apalagi, beberapa waktu lalu, Pemkab Bantul sempat menerapkan work from office (WFO).

Tidak hanya Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipti Indragunil menginformasikan bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono V tidak memperlakukan terkait Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat perihal WFH. Namun, fleksibilitas kerja tidak boleh mengorbankan dengan baik.

Penda DIY menegaskan tidak akan menerapkan pemotongan WFH yang laku untuk semua instansi. Penentuan jumlah pegawai yang bekerja dari rumah akan bergantung pada jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing OPD.

Sektor yang istilahnya yang pelayanan langsung publik ya tidak bisa (WFH)," katanya.

Jika proses perumusan berjalan lancar, kebijakan ini diprediksi mulai diterapkannya untuk hal lain. Apalagi penerapannya sudah pernah dilakukan, salah satunya saat sebelum dan sesudah libur Lebaran.

Suatu itu, ASN Kulon Progo melakukan work from office (WFH) pada dua hari sebelum libur Lebaran dan hari setelahnya. Namun, WFH diadani maksimal hanya 20 persen dari total ASN dalam satu OPD. "WFA kembali bisa jadi tahun evaluasi," kata Sudarmanto.

Wakil Bupati Kulon Progo, Antur Purwokito menyanggah kinerja ASN saat WFH harus menjadi perhatian. Ia tak ingin kinerja mereka jadi turun hanya karena mereka bisa bekerja dari rumah.

Ia menilai perlu ada indikator khusus dalam menilai kinerja ASN saat WFH. Tujuannya agar kebijakan WFH untuk penghematan energi tidak mengabaikan esensi kerja yang utama bagi para ASN.

"Terlalu ada pengawasan dan penilaian demi menjaga integritas kinerja ASN," jelas Antur.

Rupali Bantui, Abdul Halim Muallih mengatakan bahwa WFH akan terseleksi mana saja pekerjaan yang bisa dijalankan atau dikerjakan di rumah. Kemudian akan ditentukan mana saja yang harus diprioritaskan.

Yang terpenting di layanan publik, ya memang mungkin di rumah. Maka, kita belum mengingit berapa ASN yang bekerja dari rumah itu," ujarnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Bantul, Agie Budi Raharjo berujar, "sema kerja dalam waktu dekat ini ada WFH dan WFH. Yang dibicarakan WFH itu pejabat tingkat pratama, eselon III, eselon II, dan eselon I. Kita harus memastikan, terutama, pendapatan, layanan publik itu juga dibicarakan," paparnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005